



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG**

**NOMOR 262 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD  
DALAM Pengerjaan Dan ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB  
LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-158/MK.6/KNL.0705/2024 tanggal 3 September 2024 perihal Penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab-Sebab Lain berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, perlu ditindaklanjuti dengan penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Dan Aset Tak Berwujud Karena Sebab-Sebab Lain Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan dan ASET TAK BERWUJUD KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan dan Aset Tak Berwujud karena sebab-sebab lain sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu untuk 7 (tujuh) NUP Aset Tak Berwujud dan 1 (satu) NUP Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan senilai total Rp7.282.527.212,- (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2024  
Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

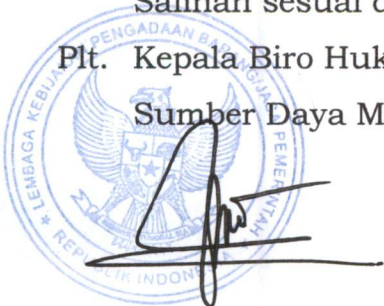
IWAN HERNIWAN

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD  
DALAM Pengerjaan dan ASET TAK BERWUJUD  
KARENA SEBAB-SEBAB LAIN PADA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 262 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Oktober 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN  
KARENA SEBAB - SEBAB LAIN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NUP	TANGGAL PEROLEHAN	TANGGAL DIHENTIKAN	JUMLAH	SK PSP	NILAI ASET	NILAI BUKU SAAT DIHENTIKAN
<b>I. SOFTWARE KOMPUTER</b>										
1	8.01.01.01.001	Software Komputer	SISMONTEPRA/ Monev NG	336	31 Desember 2012	16 Oktober 2023	1	KMK NOMOR 90/KM.6/KN.5/2014	Rp 423.379.000	Rp -
2	8.01.01.01.001	Software Komputer	Monev NG	405	31 Desember 2014	16 Oktober 2023	1	SK Kepala LKPP Nomor 315 Tahun 2015	Rp 1.328.792.025	Rp -
3	8.01.01.01.001	Software Komputer	e-Purchasing	457	30 Desember 2016	28 Januari 2020	1	KMK Nomor 73/KM.6/KNL.0705/2024	Rp 474.036.000	Rp -
4	8.01.01.01.001	Software Komputer	DCE Dashboard	499	31 Desember 2018	16 Oktober 2023	1	SK Kepala LKPP Nomor 106 Tahun 2020	Rp 171.572.850	Rp -

5	8.01.01.01.001	Software Komputer	e-Pengawasan	537	13 Desember 2019	16 Oktober 2023	1	KMK Nomor 59/KM.6/WKN.07/KNL.05/2020	Rp 233.740.000	Rp -
6	8.01.01.01.001	Software Komputer	BMC Remedy Incident and Problem	517	30 Mei 2017	1 April 2024	1	KMK Nomor 7/KM.6/WKN.07/KNL.05/2020	Rp 4.186.224.560	Rp -
7	8.01.01.01.001	Software Komputer	Open Stack	518	30 Mei 2017	1 April 2024	1	KMK Nomor 7/KM.6/WKN.07/KNL.05/2020	Rp 332.980.000	Rp -
<b>II. ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan</b>										
1	8.02.01.01.001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	SIVIA	29	18 Desember 2019	27 Maret 2024	1	-	Rp 131.802.777	Rp 131.802.777
<b>TOTAL</b>									<b>Rp 7.282.527.212</b>	<b>Rp 131.802.777</b>

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN